

**ANALISA DAMPAK PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) TERHADAP POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*

Oleh:

LILI RAHAYU NINGSIH
NPM. 1305180021



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

LILI RAHAYU NINGSIH. Analisa Dampak Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pola pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Simalungun.

Pada tahun 2007 pemerintah kembali membuat suatu program untuk penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu Program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (*cash transfer*) kepada KSM penerima bantuan. Total 6 juta penerima PKH, dengan anggaran pemerintah sebesar Rp 9,98 triliun. Pematang Kerasaan adalah salah satu Nagori/kelurahan yang berada di Kecamatan Bandar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.856 orang dan 1.132 kepala keluarga dengan 120 rumah tangga yang menerima PKH.

Maka diambil sampel sebanyak 55 Kepala keluarga dengan menguji secara komparatif, maka diperoleh hasil ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan.

Pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk kepala keluarga laki-laki lebih besar dibandingkan dengan pola pengeluaran kepala keluarga perempuan, hal ini dikarenakan rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki cenderung membelanjakan untuk pengeluaran konsumtifnya (Rokok, ngopi diwarung) sedangkan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan lebih memikirkan membelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pembelian konsumtif.

Kata kunci : Program Keluarga Harapan(PKH), Pengeluaran,Rumah Tangga

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan proposal yang berjudul “**Analisa Dampak Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Di Kabupaten Simalungun**”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Zulaspan Tupti, SE, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dra. Lailan Safina Hsb, SE, Msi, selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S, selaku Sekertaris Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Roswita Hafni, SE, Msi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis.

Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen mata kuliah Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan diakhirat kelak.
7. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik.
8. Orang tua tercinta (Suyitno dan Masnah), sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi. Semoga suatu saat penulis dapat membalas kebaikan yang diberikan dan dapat membuat bangga.
9. Keluarga Saya (Seluruh anggota Keluarga), terima kasih sudah sering membantu penulis dalam segala hal.
10. Untuk orang terkasih (Erma Juwita), (Muhammad Arif), (Deliza Saputri), (Dedi Bambang Saputra) terimakasih telah banyak membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam canda tawa serta duka yang telah banyak kita lewati bersama.
11. Sahabat Saya (Sintia Afriani), (Indah Utami), Terimakasih untuk ketulusan mengantar, menemani membantu dan memberi segala masukan serta selalu ada dalam memberi support kepada penulis, selalu menghilangkan kepenatan penulis dalam pembuatan skripsi ini
12. Teman Seperjuangan Saya di Perantauan (Pitri Khairani), (Halimah Siregar), (Tika Damayanti), (Putri Ramadani Tobing), (Mahfuza Azmi), (Sri Fitri Handayani), (Humairah Saragih), terima kasih atas semua bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama berada jauh dari keluarga, sukses menanti kita.

13. Teman-teman IESP angkatan 2013 dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, terima kasih yang terdalam untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Terima Kasih

Medan, April 2017

Penulis

Lily Rahayu Ningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
1. Batasan Masalah.....	9
2. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	13
1. Pendapatan Nasional.....	13
2. Pendapatan Rumah tangga.....	15
3. Pengeluaran Pemerintah.....	18
4. Pengeluaran Negara.....	27

5. Pengeluaran Daerah	29
6. Pengeluaran Rumah Tangga.....	30
7. Program Pemerintah	33
8. Pengertian Dampak	36
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Hipotesis.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Defenisi Operasional Variabel.....	42
C. Tempat Penelitian Dan Waktu Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel.....	44
Populasi.....	44
Sampel	44
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
1. Hipotesis.....	47
2. Uji Statistik.....	47
3. Kriteria Uji.....	48
4. Kesimpulan.....	48

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Nagori Pematang Kerasaaan.....	49
1.1 Kondisi Geografis.....	49
1.2 Kondisi Topografi	50
1.3 Sarana Pendidikan,Kesehatan,Ibadah dan Transportasi	51
B. Pembahasan.....	52
1. Analisis Secara Deskriptif.....	52
2. Analisis Secara Induktif	57
1) Analisis Uji Beda t	57
a) Hipotesis.....	57
b) Perhitungan Data	58
c) Uji Statistik.....	59
d) Kriteria Uji.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel III.1 Waktu Penelitian	43
Tabel IV.1 Idetitas Responden Berdasarkan Kepala Keluarga	53
Tabel IV.2 Idetitas Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan	54
Tabel IV.3 Idetitas Responden Berdasarkan Pendapatan	54
Tabel IV.4 Group Statistics	58
Tabel IV.5 Independent Samples Test	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kurva Pengembangan Pengeluaran Pemerintah.....	21
Gambar II.2 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar III.1 Kurva Distribusi Normal.....	48
Gambar IV.1 Diagram pengeluaran dampak PKH berdasarkan Usia.....	55
GambarIV.2 Diagram Pengeluaran dampak PKH Berdasarkan Pekerjaan....	56
Gambar IV.3 Diagram Pengeluaran Berdasarkan Pendidikan	57
Gambar IV.4 Kurva Distribusi Normal	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negaraberkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan adanya permasalahan terutama kemiskinan ini, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin diseluruh Indonesiasetelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dipusatkan pemerintah untuk

membantu Rumah Tangga sasaran(RTS) dalam memenuhi kebutuhan Primer atau kebutuhan dasar. Di sini rumah tangga sasaran menurut Instruksi Presiden adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin(Poorest), miskin(Poor) dan hampir miskin(near poor).

BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 (Inpres 3/2008) pada tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini memberikan Rp.100.000,- per bulan dimulai dari bulan juni berakhir di bulan desember tahun 2008, selama tujuh bulan. Sebelumnya pada tahun 2005 – 2006, Pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005. Program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun pada periode 2005 – 2006. Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterima per triwulan sebesar Rp 300.000,- dengan anggaran 5 triliun dan 19,1 juta rumah tangga sasaran.

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai(BLT) yaitu untuk membantu masyarakat miskin diseluruh Indonesia, tetapi program Bantuan Langsung Tunai(BLT) ini sendiri masih kurang efektif dalam pemerataan penerimanya karena banyak yang belum tepat sasaran. Tingkat kemiskinan akan

semakin tinggi jika tingkat ketepatan semakin rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran sangat menentukan dampak BLT terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, masalah ketepatan sasaran sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan menjadi sangat penting, walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan itu sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan.

Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) banyak digunakan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Namun, untuk penentuan sasaran penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kali ini, digunakan kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik mengeluarkan 14 kriteria kemiskinan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel I.1. Kriteria Kemiskinan Warga Miskin Yang Dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal.	Kurang dari 8(delapan) m ² /orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/Bambu/kayu murahan/semem kualitas rendah
3	Jenis dinding tempat tinggal	Bambu/Rumbia/Kayu Kualitas rendah/Tembok tanpa plester
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya/Bersama
5	Sumber penerangan utama	Bukan Listrik
6	Bahan bakar untuk masak	Kayu bakar/ Arang.
7	Konsumsi daging/susu/ayam per minggu	Tidak pernah mengkonsumsi / hanya satu kali dalam seminggu
8	Sumber air minum	Sumur / Mata air tidak terlindungi/sungai/Air hujan.
9	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli/ Hanya membeli satu steldalam setahun
10	Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga	Kurang dari dua kali dalam sehari

11	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani dengan luas lahan setengah hektare/buruh tani/kuli bangunan/tukang batu/tukang becak /pemulung/pekerja informal lainnya dengan pendapatan Rp.600.000,00 perbulan
12	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/Hanya sampai jenjang SD dan tidak lebih
13	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp.500.000,-	Tidak ada
14	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak mampu.

Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS).go.id

Selain 14 poin diatas ada satu catatan tambahan: Bila ada anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, Pensiunan PNS/TNI/polri, maka keluarga tersebut tidak termasuk penerima BLT.(sumber:<http://blogberita.net/2008/06/05/14.syarat-warga-miskin-penerima-blt/1810208/19.25>).

Pada tahun 2007 pemerintah kembali membuat suatu program untuk penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu Program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH. PKH merupakan program nasional yang telah di implementasikan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial RI. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (*cast transfer*) kepada KSM penerim bantuan.PKH merupakan program perlindungan sosial melalui

pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Bantuan PKH terbagi dalam dua komponen, yakni kesehatan dan pendidikan. Sampai tahun 2016 jumlah penerima PKH ada sebesar 3,5 juta orang dan rencananya ada penambahan sekaligus diperluas kepada 2,5 juta menjadi total 6 juta penerima, dengan anggaran pemerintah sebesar Rp 9,98 triliun.

PKH berbeda dengan program perlindungan sosial lainnya yang berbentuk bantuan tunai, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) serta KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Letak perbedaannya program ini hanya untuk keluarga sangat miskin (KSM). PKH merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial berupa bantuan tunai bersyarat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Sehingga dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Tahun 2015, ibu hamil diberikan Rp1 juta untuk empat kali pencairan. Sedangkan 2016, ditingkatkan besaran bantuannya menjadi Rp1,2 juta. Sementara bantuan sosial lanjut usia, senilai Rp2,4 juta dan bantuan disabilitas sejumlah Rp3,6 juta. Kedua bantuan sosial tersebut dicairkan tiga kali dalam satu tahun. bagi komponen pendidikan diperuntukkan bagi murid SD sebesar Rp450 ribu, pelajar SMP Rp750 ribu, dan SMA sebesar Rp1 juta per tahun dibagi ke dalam empat pencairan dalam setahun.

Kabupaten Simalungun termasuk ke dalam salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang lumayan tinggi. Jumlah Rumah tangga sasaran (RTS) yang sudah memenuhi kriteria kemiskinan tahun 2011 hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS 2011) di Kabupaten Simalungun terdapat 51.792 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada tahun 2011 yang tersebar di

31 kecamatan. (BPS kabupaten Simalungun,PPLS 2008/2011/BPS). jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013 (SUSENAS 2013) sebanyak 87,70 ribu jiwa atau 10,45 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 yang mencapai 9,97%.

Dari 31 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Simalungun yang memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)terbesar kedua yaitu Kecamatan Bandar sebesar 3.615 pada tahun 2008 dan juga memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbesar kedua pada tahun 2011 yaitu sebesar 2.990 (RTS)yang tersebar di 16 Nagori/Kelurahandari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008/2011/BPS).

Pematang Kerasaan adalah salah satu Nagori/kelurahan yang berada di Kecamatan Bandar dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 3.856 orang. Jumlah kepala keluarga di kelurahan pematang kerasaan adalah sebesar 1.132 kepala keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) juga sampai pada Nagori Pematang kerasaan, ada 120 rumah tangga yang menerima PKH. (Kantor Kelurahan Nagori Pematang Kerasaan)

PKH di pusatkan Pemerintah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah kesejahteraan dari kelompok yang paling miskin, maka dengan adanya PKH ini diharapkan masyarakat miskin di Nagori Pematang Kerasaandapat memenuhi kebutuhan primernya serta mampu menaikkan taraf kesejahteraan aksibat kesulitan ekonomi. Pada kenyataannya banyak masyarakat miskin atau penerima bantuan masih saja mengeluh dengan keadaan ekonomi yang sulit padahal pemerintah sudah mencoba membantu dengan PKH, ternyata dana yang diberikan oleh pemerintah

kepada masyarakat miskin ini banyak disalahgunakan oleh penerima bantuan untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting bahkan bisa dikatakan tidak penting sama sekali. Contoh: walaupun pengambilan dana dilakukan oleh ibu-ibu atau dalam kata lain perempuan tertua yang ada didalam keluarga tetapi jika perempuan tidak ada(KK Laki-laki) Tidak jarang masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kepala keluarga laki-laki sering menggunakan dana PKH ini untuk membeli rokok dan nongkrong di warung kopi yang sudah jelas itu dapat merusak kesehatannya serta mengurangi jam kerja yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja. Jika uang untuk membeli rokok itu digunakan untuk membeli susu anaknya itu sudah pasti dapat membantu menaikkan menaikkan taraf kesejahteraan bagi keluarganya dari sisi kesehatan. Bayangkan jika harga rokok per bungkus Rp. 10.000,00 dan per hari menghabiskan 1 bungkus rokok maka jika dijumlahkan $Rp. 10.000,00 \times 30$ hari = Rp.300,000,00 perbulan hanya untuk membeli rokok. Hal semacam ini yang membuat banyak masyarakat miskin terus menerus tidak bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

Fenomena yang juga saat ini sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan karena masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ikut bahkan bisa dikatakan kaya pun ikut mendaftarkan diri sebagai calon penerima PKH. Fenomena semacam ini juga terjadi di Nagori Pematang Kerasaan, meskipun setiap calon penerima harus mempunyai kriteria kemiskinan yang sudah ditentukan tapi banyak masyarakat yang kaya yang menjadi penerima PKH. Hal yang menyebabkan terjadinya fenomena ini adalah Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan

pemberian dana PKH kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan yang disebabkan oleh KKN, padahal sebenarnya tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan, Maka bukan orang miskin lagi yang menerima bisa saja orang lain padahal masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima PKH. Bahkan seringkali orang yang mengambil dana PKH menggunakan kendaraan yang bagus dan memakai perhiasan emas. Fenomena semacam ini yang membuat dana PKH disalah gunakan oleh penerima yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan tersebut. Contoh: Tidak jarang masyarakat penerima PKH dengan kepala keluarga perempuan menggunakan dana yang diberikan untuk membeli baju baru, sepatu baru dll, tentu saja kalau sudah hal semacam ini terjadi maka dana bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi tidak efektif lagi karena karena kurang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisa Dampak Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Simalungun”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima PKH memiliki Kriteria kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik tetapi masih banyak penerima PKH yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PKH.

- 2) PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin tetapi masih banyak penerima PKH menyalahgunakan dana PKH yang diberikan pemerintah.
- 3) PKH dipusatkan pemerintah untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan primer atau dasar dan memutus mata rantai kemiskinan.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive atau secara sengaja, yaitu dengan tehnik penentuan suatu daerah berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah dibuat terdapat suatu objek yang sesuai dengan tujuan. Daerah penelitian yang dipilih adalah nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, karena kelurahan Pematang Kerasaan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bandar yang memiliki jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup banyak.
2. Responden atau sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di nagori Pematang Kerasaan.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada Pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bnadar Kabupaten Simalungun?
2. Apakah ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pengeluaran rumah tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengeluaran rumah tangga untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagori pematang Kerasaan kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ?

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai ketepatan sasaran bagi masyarakat miskin yang akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penelitian mengetahui fenomena yang terjadi di Kabupaten Simalungun dan peneliti dapat mengetahui dampak yang diterima oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Simalungun.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan, dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Nasional

Menurut Dumairy (1996:37) Pendapatan Nasional dapat berarti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional dapat merujuk ke produk Domestik Bruto(PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) ; atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP); Produk Nasional Neto (PPN) atau Net National Product (NNP); atau merujuk ke pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI).

Pendapatan Nasional dapat juga diartikan sebagai produksi Nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.

1.1. Konsep Pendapatan Nasional

a. Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun.

$GDP = \text{Pendapatan Masyarakat DN (dalam negeri)} + \text{Pendapatan Asing DN (dalam negeri)}$.

Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut.

b. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (Nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan diluar negeri.

$$\text{GNP} = \text{Pendapatan WNI DN} + \text{Pendapatan WNI LN (luar negeri)} - \text{Pendapatan Asing DN}$$

c. Produk Nasional Netto (NNP)

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{depresiasi (penyusutan barang modal)}$$

Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil.

d. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung}$$

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dll.

e. Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji pegawai negeri, maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai.

$$PI = NNI - \text{Pajak perusahaan} - \text{Iuran} - \text{Laba ditahan} + \text{transfer payment}$$

Transfer Payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya.

f. Pendapatan yang siap dibelanjaka

Disebut juga dengan disposable Income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

$$DI = PI - \text{Pajak Langsung}$$

Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan.

2. Pendapatan Rumah Tangga

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergantung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup di dalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan (Syafrudin, 2009).

Pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas

karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.

Pendapatan keluarga sesuai dengan pengertian Badan Pusat Statistik, berasal dari tiga sumber utama:

- Pertama berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja, yaitu upah dan gaji, keuntungan, dan bonus yang merupakan balas jasa dari tenaga kerja.
- Kedua, balas jasa kapital yang diperoleh dari bunga, bagi hasil, sewa, dan lainnya yang diterima oleh rumah tangga.
- Ketiga adalah pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (*transfer payment*), contohnya dapat berupa hibah maupun pemberian yang berasal dari rumah tangga lain, perusahaan, dan luar negeri (SNSE Indonesia Tahun 2005).

Sedangkan untuk pendapatan rumah tangga sendiri, SNSE mendefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan, baik berasal dari kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.

Pendapatan rumah tangga dapat diketahui dengan menjumlahkan pendapatan keluarga dari semua sumber pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga dapat beragam. Ukuran pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah pendapatan keluarga yang diperoleh dari bekerja.

Pendapatan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pendapatan permanen (*permanent income*)

Adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).

2) Pendapatan sementara (*transitory income*)

Adalah pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pada hakikatnya pendapatan nasional merupakan gabungan dari seluruh pendapatan rumah tangga dalam perekonomian. Pendapatan rumah tangga diperoleh sebagai balas jasa atas faktor produksi yang telah diberikan dari rumah tangga atau penyedia faktor produksi (tenaga kerja) kepada perusahaan dalam perekonomian dua sektor. Namun pada kenyataannya pendapatan nasional tidak bisa disamakan dengan pendapatan rumah tangga.

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Pertama sebagian pendapatan rumah tangga diperoleh bukan dari penawaran faktor-faktor produksi, sebagai contohnya adalah beasiswa, dan pendapatan berupa dana pensiun. Kedua, pendapatan faktor-faktor produksi sebagian tidak dibayarkan kepada rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima rumah tangga sebenarnya sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pendapatan faktor yang tidak dibayarkan kepada rumah tangga ditambah dengan pendapatan rumah tangga yang bukan berasal dari penawaran faktor produksi. (Sadono Sukirno, 1999).

Dalam pendapatan rumah tangga terdapat tiga komponen dari pendapatan faktor-faktor produksi yang tidak diterima oleh rumah tangga, yaitu pertama pajak keuntungan perusahaan korpora, kedua keuntungan yang tidak dibagi, ketiga

kontribusi untuk dana pengangguran. Sedangkan untuk pendapatan yang diterima di luar pendapatan dari penawaran faktor produksi diperoleh dari pembayaran pindahan (*transfer payment*) dan pendapatan pribadi dari bunga.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan. Dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Soekartawi menjelaskan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatan.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga, sehingga pendapatannya bertambah”.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

3.1. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, menurut Boediono (1999) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

a. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin

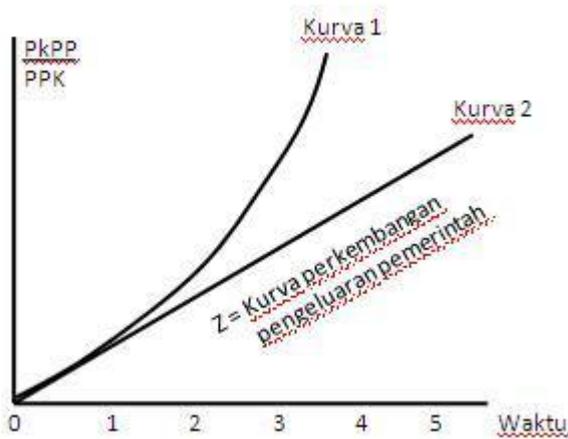
meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP}{PPK} = Z < .. < \frac{PPK}{PPK}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)



Gambar II.1

Kurva perkembangan pengeluaran pemerintah

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

b. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan

prasarana kepengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam

dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

d. Teori batas kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi

penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

3.2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S)$$

U_p = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = vector barang public

X = vector barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :

$$P_x X + t B < M_i$$

P = vektor harga barang swasta

X = vektor barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*PriceTaker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

4. Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1. Macam-macam Pengeluaran Negara

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat.

Menurut Organisasi pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni :

a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah Pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang,

subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana ekonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri.

b. Pemerintah Provinsi

Jika di pemerintah pusat terdapat APBN , maka di pemerintah Provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari pemungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dana perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain dan belanja tak terduga.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam Kabupaten/kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/kelurahan, pengeluaran untuk pembiayaan, terdiri dari, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain :

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar dimasa yang akan datang, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

5. Pengeluaran Daerah

Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar di pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukan bagi pendidikan dasar, menengah mencerminkan manfaat dari adanya anggaran daerah. Tentulah tenaga kerja terdidik akan menaikkan produktivitas suatu perekonomian.

Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain : pemadaman kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-taman dan rekreasi, dan sebagainya, semuanya ini adalah barang-barang umum dalam pengertian yang sebenarnya. Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, maka tidak ada cara apapun yang dapat mengecualikan siapa saja didalam daerah ini dapat menggunakannya.

Susunan pengeluaran daerah ini di susun dengan mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mustopadidjaya, AR (1997:12) menyatakan bahwa penyusunan rencana Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran-sasaran spesifik sektoral dan regional.

6. Pengeluaran Rumah tangga

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama

serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu (bps.go.id). Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga deviden, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/ jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Ada dua cara penggunaan pendapatan atau dengan kata lain pengeluaran rumah tangga, Yang pertama, membelanjakannya untuk barang konsumsi. Yang kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

Menurut Sukirno, (1994: 38) menyatakan bahwa pengeluaran rumah tangga sebagai suatu nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun atau periode waktu tertentu, pendapatan yang diterima rumah tangga akan dipergunakan untuk membeli makanan, pakaian, membayar pendidikan dan sebagainya.

6.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2007 : 36) mengartikan pengeluaran sebagai suatu penggunaan uang, barang atau jasa yang digunakan baik untuk

keperluan konsumsi makanan maupun non makanan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama satu bulan.

Pengertian pengeluaran secara umum sering dinyatakan sebagai tindakan seseorang (individu) atau kelompok dalam membelanjakan pendapatannya dengan tujuan membeli barang dan jasa yang diinginkan.

Pengeluaran tidak selalu untuk membeli barang-barang yang dapat dimakan dan diminum, namun didalam pengeluaran itu termasuk juga semua barang dan benda benda yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara jasmani maupun rohani.

Dalam penerapannya, peningkatan pendapatan individu atau rumah tangga biasanya digunakan untuk menambah konsumsi bahan pokok guna memenuhi kehidupan sehari-hari sampai melewati batas tertentu dan setelah batas tersebut terlampaui, maka peningkatan pendapatan individu atau rumah tangga cenderung dipergunakan untuk mengkonsumsi barang mewah dalam kehidupan sehari-hari.

Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup, karena pengeluaran konsumsi tersalur ke pengeluaran pangan, sandang, perumahan, bahan bakar, pengangkutan, hiburan dan perawatan kesehatan. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi pangan adalah terpenting, karena pangan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga.

Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

6.2. Pengeluaran Non konsumsi rumah tangga (saving)

Tabungan rumah tangga diperoleh apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan dan untuk transfer(bps.go.id). Tabungan keluarga sifatnya statis dan tidak berbunga. Tabungan yang demikian hanya hoording, kalau tabungan itu digunakan misalnya dibelikan barang baru terjadilah dishoording. Untuk menggiatkan tabungan keluarga statis kearah tabungan dinamis atau produktif, pemerintah menarik para penabung dengan cara tabanas dan taska (chainago dan Mudjihardjo, 1982).

Rumah tangga menabung dengan beberapa tujuan antara lain :

- 1) Berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya pengeluaran belanja yang tak diduga dan tak diketahui sebelumnya.
- 2) Memperbaiki taraf hidup seseorang dimata masyarakat (misalnya tabungan untuk konsumsi mewah)
- 3) Untuk dapat membeli barang-barang tertentu yang tidak dapat dimiliki dengan pendapatan sekarang ini.
- 4) Cadangan untuk masa depan
- 5) Sebagai jaminan, misalnya jika terjadi pendapatan yang turun naik.

7. Program Pemerintah

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999

menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- Menyempurnakan program perlindungan sosial
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- Pemberdayaan masyarakat, dan
- Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

- Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
- Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

7.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Panduan Umum, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: Suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

7.2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah : Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM/KSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTSM/KSM. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *MillinniumDevelopment Goals* (MDGs).

Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM

- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak RTSM
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar,
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM

7.3. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu:

- a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita,
- b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah)
- c. Anak SD/MI (usia 7-12 tahun),
- d. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun),
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

8. Pengertian Dampak

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak lain dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dampak pola pengeluaran rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan dan laki-laki yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Judul, Nama Penulis, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kaupaten Siak Dian Marini (2016)		kuantitatif inferensial	penelitian ini menunjukkan bahwasannya 75 responden yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini semua disebabkan karena 54 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 respponden dan Bantuan

			Langsung tunai (BLT) memiliki lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya.
Bantuan Langsung Tunai Selviana (2016)		Deskriptif kualitatif	1. Implementasi bantuan langsung tunai dikelurahan karena kecamatan mamuju kabupaten mamuju hampir semua sudah mengenai rumah tangga sasaran tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak tersentuh bantuan hal ini disebabkan karena pendataan yang dilakukan tidak menyentuh semua sasaran rumah tangga miskin dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang program bantuan langsung tunai sehingga banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh atau menerima bantuan padahal

			<p>masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan</p> <p>2. dampak bantuan langsung tunai terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah bantuan langsung tunai ini dianggap tidak efektif dan efisien karena kurang membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat hal ini disebabkan masyarakat menggunakan dana tersebut bukan untuk jangka panjang atau bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dampak lainnya yaitu masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai karena masyarakat terus mengharapkan bantuan</p>
--	--	--	--

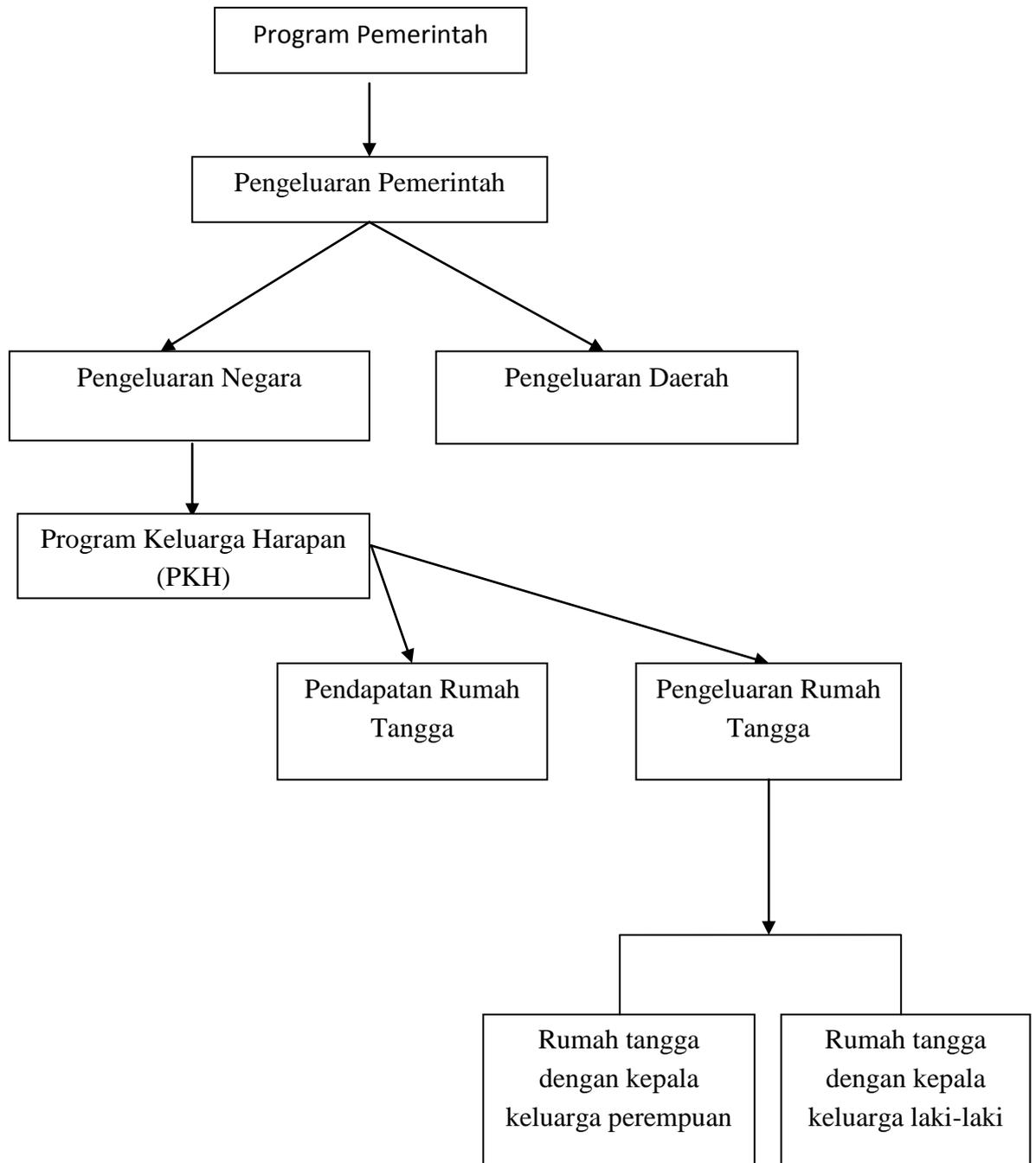
			dari pemerintah.
Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjung Pinang Tahun 2012 Nur Dhillaharyati (2015)		Deskriptif kualitatif	hasil penelitian maka dapat ditemukan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Kemudian dalam hal pengawasan juga belum berjalan dengan baik, pengawasan belum efektif. pelaksanaan BLT melibatkan Badan Pengawas

		<p>16 Keuangan dan Pembangunan dan perangkat pemerintah setempat sebagai unsur pengawasan atas penyaluran BLT. Jaksa Agung juga memerintahkan para kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indonesia mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan BLT secara keseluruhan, nantinya pemerintah diharapkan memberikan laporan pertanggungjawaban untuk bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga bisa diketahui apakah pelaksanaan kali ini sudah benar-benar seperti yang diharapkan. Audit ini diperlukan mengingat</p>
--	--	---

			<p>besarnya dana yang digunakan untuk program BLT ini. Kemudian belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan. Hal ini membuat program ini berjalan tidak tepat sasaran</p>
--	--	--	---

C. Gambar Kerangka Konseptual

Dari latar belakang penelitian dan landasan teori penelitian, maka peneliti dapat membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar II.2

D. HIPOTESIS

Dari kerangka konseptual diatas maka peneliti menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat hipotesis (dugaan sementara) sebagai berikut :

H_0 : $b=0$ (tidak terdapat perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kersaan kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)

H_a : $b \neq 0$ ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kersaan kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis pendekatan deskriptif induktif. Menurut kuncoro (2003,hal.36) bahwa metode deskriptif induktif meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Teknik pelaksanaan dari penelitian ini menggunakan metode *survey*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang pokok dan secara umum menggunakan metode statistik (Singarimbun dan Effendi, 1995).

B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pengeluaran rumah tangga, tujuannya untuk mengetahui perbedaan pola pengeluaran rumah tangga untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Definisi variabelnya adalah sebagai berikut :

1. **Pengeluaran Rumah tangga** adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya baik itu barang konsumsi maupun non konsumsi (saving) dalam satu tahun atau periode waktu tertentu dalam satuan rupiah (Rp).

2. **Program Keluarga Harapan (PKH)** adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai kepada masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam satuan rupiah (Rp).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagori Pematang Kerasaan kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Adapun alasan pemilihan lokasi dikarenakan Nagori Pematang Bandar memiliki banyak penduduk miskin yang mayoritas mendapatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel III.1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Febuari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data, pengajuan judul, dan pengesahan judul	■	■																						
2	Penulisan proposal		■	■	■	■	■	■	■																
3	Seminar Proposal											■	■												
4	Analisis data													■	■	■	■								
5	Penulisan laporan																	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Sidang meja hijau																								■

D. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian itu sendiri. Menurut Kuncoro (2001 :bab 3) popuasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah seluruh rumah tangga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagori Pematang kerasaan yang berjumlah 120 rumah tangga.

Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian. Peneliti menggunakan sampel sebagai cara utama guna menaksir perilaku dalam suatu populasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan desain *sampel probabilitas* dengan metode sampling simple random sampling, yaitu setiap elemen dalam pupulasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan derajat kesalahan atau $\alpha = 10\%$ dengan derajat kepercayaan 90% , artinya peneliti yakin bahwa dalam hal mengestimasi parameter populasi tingkat kebenarannya 90%. Alasan peneliti menggunakan $\alpha = 10\%$ karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya lainnya dalam melakukan penelitian.

Maka dalam hal penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + e \cdot N}$$

Dimana :

N : Jumlah populasi

n : Jumlah sampel

e : Person kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 10%.

Persentase kelonggaran ketidaktelitian menggunakan 10% karena dari hasil sampel yang didapatkan dianggap sudah mewakili populasi. Maka besarnya sampel adalah :

$$n = \frac{N}{1 + e \cdot N}$$

$$n = \frac{N}{1 + e \cdot N}$$

$$n = 54,5 \text{ (55) responden}$$

Dari perhitungan diatas maka didapatkan jumlah sampel yaitu sebanyak 55 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada responden atau beberapa rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dikecamatan Bandar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data-data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Nagori Pematang Kerasaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara, sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat daftar pertanyaan kepada responden yang sudah menjadi anggota sample penelitian.

G. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dan memebdakan hasil pengamatan untuk perlakuan yang tidak sama, Yang disebut dengan uji beda 2 rata-rata (Dhani,Roswita) adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

1. Hipotesis

H_0 : $b=0$ (tidak terdapat perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala

keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

$H_1 : b \neq 0$ (ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun).

2. Uji statistic yang digunakan adalah uji beda t :

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X}_L - \bar{X}_P}{\sqrt{\frac{S_L^2}{n_L} + \frac{S_P^2}{n_P}}}$$

Dimana:

Jumlah Sampel kepala keluarga laki-laki = n_L

Jumlah sampel kepala keluarga perempuan = n_P

Rata-rata pengeluaran kepala keluarga rumah tangga laki-laki = \bar{X}_L

Rata-rata pengeluaran kepala keluarga rumah tangga perempuan = \bar{X}_P

Simpangan baku pengeluaran rumah tangga laki-laki = S_L

Simpangan baku pengeluaran rumah tangga perempuan = S_P

Derajat kesalahan = α

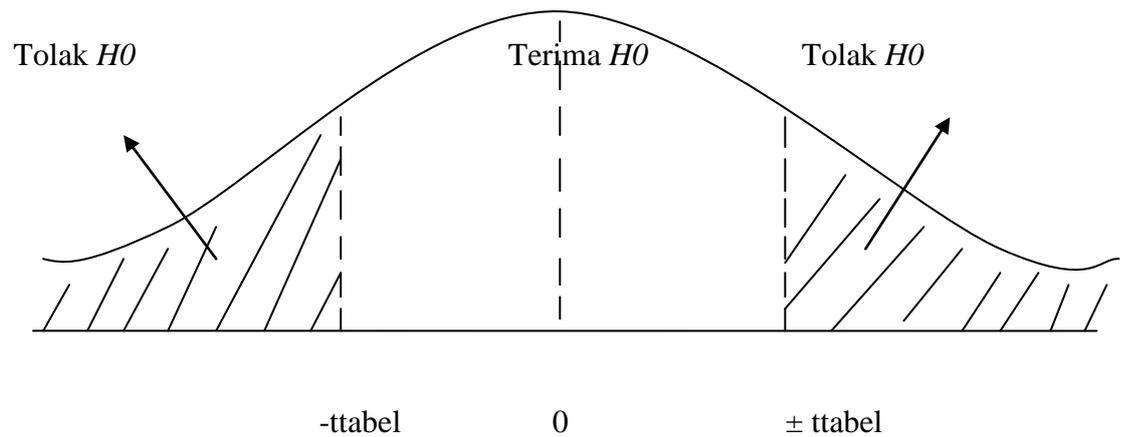
Dan nilai thitung dibandingkan dengan nilai t tabel dimana t tabel = $\pm t_{tabel} (\alpha/2, n_L+n_P-2)$

3. Kriteria Uji

1. Terima H_0 Jika nilai thitung berada dalam internal ttabel atau

$-ttabel \leq thitung \leq ttabel$ hal lain tolak H_0 atau dalam dalam kurva distribusi

normal adalah :



Gambar III.1

4. Kesimpulan

Dalam hal ini peneliti untuk mengolah datanya menggunakan alat bantu program komputer dimana dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$, dikatakan sig jika nilai sig $\leq \alpha = 10\%$ atau tolak H_0

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Pematang Kerasaan

1.1. Kondisi geografis

Pematang Kerasaan adalah salah satu desa kecil di Sumatera Utara, Indonesia, tepatnya di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Letaknya lebih kurang 170 km dari Kota Medan dan 40 km dari Kota Pematang Siantar. Desa ini dikelilingi oleh perkebunan, baik perkebunan yang dikelola oleh negara maupun yang dikelola oleh swasta. Masyarakat setempat umumnya bertani dan berdagang, namun adapula yang bekerja di industri rumahan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Secara geografis, wilayah Pematang Kerasaan berada antara 03°16' LU dan 099°33' BT dengan luas wilayah 5,70km² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Batas Utara: Kecamatan Bandar Masilam
- Batas Selatan: Kecamatan Huta Bayu Raja
- Batas Timur: Kecamatan Bosar Maligas dan Kabupaten Batu Bara
- Batas Barat: Kecamatan Pematang Bandar

Berdasarkan mutasi mutandis Nagori Pematang Kerasaan bulan Februari tahun 2017, penduduk Pematang Kerasaan berjumlah 3.359 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1.596 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.763. Mayoritas para penduduk memeluk agama islam yaitu sebanyak 2.568 jiwa, agama kristen 748 jiwa, katolik 363 jiwa, budha 12 jiwa dan aliran K

sebanyak 12 jiwa. Suku bangsa yang dapat ditemukan di desa ini adalah Batak (Toba, Simalungun, Karo), Jawa, Tionghoa, Melayu, Aceh serta keturunan India, Belanda dan Portugis.

1.2.Kondisi Topografi

Letak desa Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar di atas permukaan laut adalah 0 – 100 meter. Berdasarkan topografinya daerah ini terletak pada ketinggian < 25 meter dengan luas wilayah 5,70 km², dan jarak desa ke ibu kota kecamatan adalah 9,5 km².

Komoditi tanaman pangan unggulan pertama di Kelurahan Pematang Kerasaan yaitu komoditi padi sawah, unggulan keduanya adalah komoditi jagung, komoditi ketiganya adalah ubi kayu. Sedangkan untuk komoditi tanaman perkebunan, memiliki unggulan pertamanya yaitu tanaman kelapa sawit, unggulan keduanya yaitu tanaman kakao, dan unggulan ketiganya yaitu tanaman kelapa. Untuk hewan ternak yang banyak dipelihara, di Kelurahan Pematang Kerasaan adalah unggulan pertamanya ternak sapi, unggulan keduanya ternak babi, dan unggulan ketiganya ternak kambing.

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Pematang Kerasaan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 3.359 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.596 jiwa dan perempuan 1.763 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.553 jiwa. Dilihat dari kelompok umur, di Kelurahan Pematang Kerasaan penduduk usia 0-16 tahun sebanyak 807 jiwa dan 17+ tahun sebanyak 2.568 jiwa. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk Kelurahan Pematang Kerasaan sebanyak 3.365

jiwa dengan komposisi TK sebanyak 216 jiwa, SD sebanyak 1.576 jiwa, SMP sebanyak 805 jiwa, SMA sebanyak 742 jiwa, S1 sebanyak 25 jiwa, dan S2 sebanyak 1 jiwa.

Menurut jenis pekerjaannya penduduk Kelurahan Pematang Kerasaan yang bekerja sebagai petani sebanyak 1.341 jiwa, buruh 58 jiwa, wiraswasta 530 jiwa, honor 45 jiwa, guru 41 jiwa, swasta 155 jiwa, TNI 5 jiwa, polisi 5 jiwa BUMN 22 jiwa, PNS 29 jiwa, pensiunan 72 jiwa, pelajar 859 jiwa, lain-lain sebanyak 181 jiwa.

1.3.Sarana pendidikan, kesehatan, ibadah dan transportasi

Total sarana pendidikan di Kelurahan Pematang Kerasaan sebanyak 17 unit, dimana terdapat 8 unit sekolah SD baik swasta maupun negeri, 6 unit sekolah SMP baik swasta maupun negeri, dan 3 unit SMA baik swasta maupun negeri.

Di Kelurahan Pematang Kerasaan terdapat 1 unit Puskesmas yang di beri nama poskesdes yang terdapat di Huta 1 Pematang Kerasaan. Tenaga kesehatan yang menetap di Kelurahan Pematang Kerasaan, dokter sebanyak 1 orang, bidan 5 orang, tenaga kesehatan lainnya 2 orang, dan dukun bayi 2 orang. Sarana ibadah umat beragama di Kelurahan Pematang Kerasaan adalah sebagai berikut: mesjid 10 unit, gereja protestan 6 unit, gereja katolik 1 unit, dan langgar 4 unit. Sarana transportasi antar kelurahan di Pematang Kerasaan telah dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Dengan kondisi jalan yang diperkeras (aspal, krikil, batu dan sebagainya).

B. Pembahasan

1. Analisa data

Pada bab ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dengan menyebarkan angket (kuesiner) kepada masyarakat di Nagori Pematang Kerasaan yang telah ditetapkan sebagai responden, yaitu sebanyak 55 responden. Menganalisis data merupakan suatu upaya untuk menata dan mengelompokkan data menjadi satu bagian-bagian tertentu berdasarkan jawaban sampel penelitian. Analisis data yang dimaksud adalah interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Adapun data-data yang dianalisis pada bab ini adalah sebagai berikut :

Rumah Tangga Dampak dari PKH Berdasarkan Kepala Keluarga

Tabel IV.1

No	Kepala Keluarga	Jumlah	Jumlah
1.	Laki-laki	32	58,18%
2.	Perempuan	23	41,81%
	Total	55	100%

Sampel yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini tidak memiliki kriteria tertentu, baik rumah tangga dengan KK laki- laki maupun rumah

tangga dengan KK perempuan yang menerima dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu masyarakat di Nagori Pematang Kerasaan dapat menjadi sampel. Teknik penarikan sampel yang telah ditetapkan peneliti adalah *simple random sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yang pengambilan sampel anggotanya dilakukan secara acak tanpa harus memperhatikan stratanya yang ada didalam populasi. Berdasarkan tabel jumlah rumah tangga KK laki-laki yaitu 58,18% sebanyak 32 kepala keluarga dan jumlah responden rumah tangga KK perempuan yaitu 41,81% sebanyak 23 kepala keluarga.

**Rumah Tangga Dampak dari PKH Berdasarkan
Jumlah Tanggungan**

Tabel IV.2

No	Anggota keluarga	jumlah	%
1	3-4	22	40%
2	5-6	30	54%
3	7-8	3	5,45%
	Total	55	100%

Dari tabel diatas maka kita bisa melihat bahwa jumlah anggota keluarga rumah tangga penerima PKH yang paling banyak adalah 5-6 yaitu 54% sebanyak 30 kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga rumah tangga penerima PKH yang paling sedikit yaitu 40% sebanyak 30 kepala keluarga.

Rumah Tangga Dampak dari PKH Berdasarkan Pendapatan

Tabel IV.3

No	Pendapatan	jumlah	%
1	<1 juta	2	3,6%
2	1-2 juta	42	76,36%
3	2,1-3 juta	11	20%
	Total	55	100%

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa pendapatan rumah tangga penerima PKH dengan jumlah 1-2 juta yaitu 76,36% sebanyak 42 rumah tangga, jumlah ini adalah jumlah paling terbanyak dibandingkan dengan jumlah 2,1-3 juta yaitu 20% sebanyak 11 kepala keluarga. Dan yang paling sedikit adalah pendapatan dengan jumlah <1 juta yaitu 3,63 sebanyak 2 kepala keluarga.

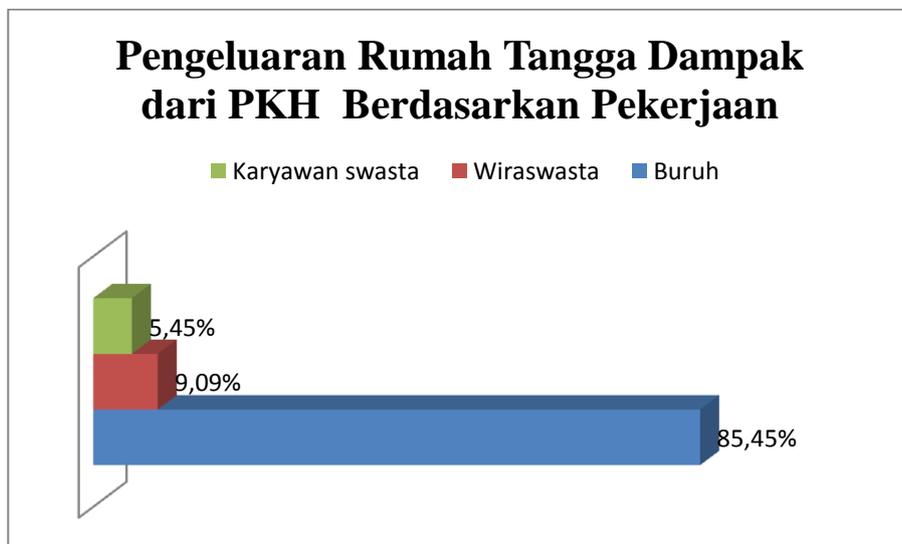
Gambar IV.1



Sumber : diperoleh dari data Kuesioner 2017

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa usia rumah tangga penerima PKH mulai dari usia 20 tahun hingga tertua umur >50 tahun. Jumlah rumah tangga penerima PKH dengan usia paling banyak adalah usia 31 – 40 tahun yaitu 36% yaitu 20 orang, dan jumlah rumah tangga penerima PKH yang paling sedikit adalah dengan usia >50 tahun ada 11% yaitu 6 orang. Kemudian untuk usia 20-30 ada 18% yaitu 10 orang dan untuk usia 41-50 ada 35% yaitu 19 orang. Mengapa usia 30-40 yang paling banyak mendapat PKH, karena memang di Nagori pematang kerasaan lebih banyak penduduk yang menerima PKH yang usianya tidak terlalu tua, karena rata-rata yang masih memiliki anggota keluarga yang masih sekolah, sehingga kepala keluarga yang diteliti pun lebih banyak usianya tidak terlalu tua dibandingkan usia tua. Demikianlah peneliti menemukan sample usia penduduk di Nagori Pematang Kerasaan.

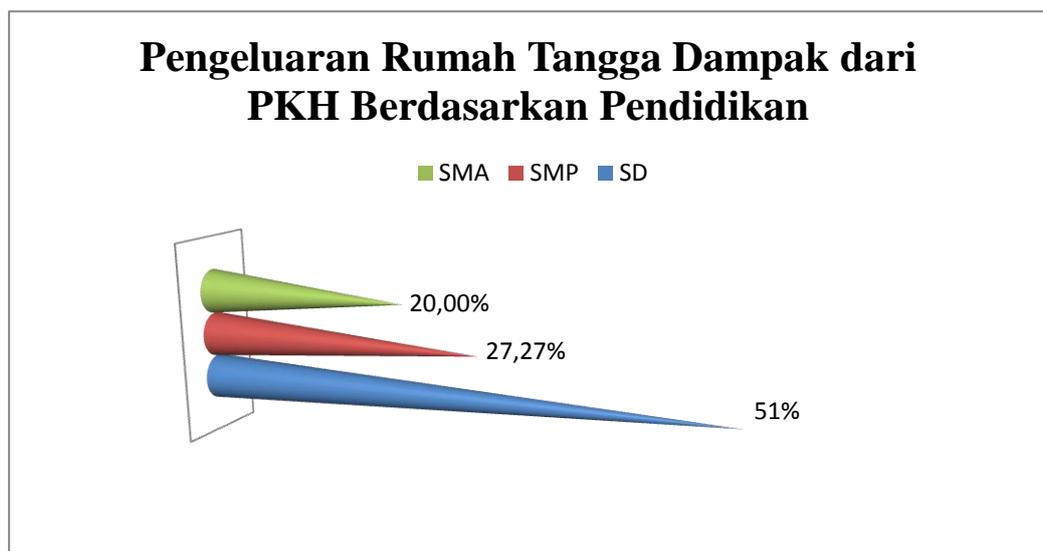
Gambar IV.2



Dari diagram diatas jelas terlihat bahwa jenis pekerjaan terbesar kepala keluarga adalah buruh dengan jumlah 85,45% yaitu 47 rumah tangga , sedangkan pekerjaan kepala keluarga yang paling banyak kedua adalah wiraswasta 9,09%

yaitu 5 rumah tangga, dan pekerjaan kepala keluarga yang paling sedikit adalah karyawan swasta dengan jumlah 5,45% yaitu 3 rumah tangga. Karena pada umumnya adalah buruh kasar, karena hal ini juga penghasilan mereka tidak menentu dan mereka berhak menerima PKH.

.Gambar IV.3



Dari diagram diatas dapat kita lihat jumlah terbanyak adalah jenjang pendidikan SD/sederajat dimana berjumlah 51% yaitu 28 kepala keluarga. Sedangkan yang tamatan SMP berjumlah 27,27% yaitu 15 kepala keluarga, dan yang tamatan SMA berjumlah 20% yaitu 11 responden, walaupun dapat kita lihat bahwa tidak ada responden yang dari Perguruan Tinggi, tetapi melihat banyaknya juga responden yang tamat SD menandakan bahwa penduduk di Nagori Pematang Kerasaan sangat mementingkan pendidikan.

2. Analisis data secara induktif

a. Uji Beda t

1) Hipotesis

$H_0 : b=0$ (tidak terdapat perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga Laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

$H_a : b \neq 0$ (ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

2) Penghitungan Data

Tabel IV.4

Group Statistics

KK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengeluaran Laki-laki	32	1.9195	.28948	.05117
Perempuan	23	1.4708	.36438	.07598

Pada bagian ini menyajikan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis, yang meliputi rata-rata (mean) pola pengeluaran rumah tangga untuk kepala keluarga laki-laki pengeluarannya yaitu sebesar Rp.1.919.500 dengan jumlah sampel 32 kepala keluarga penyimpangan pengeluaran tersebut Rp. 289.480,- dan

standar eror dari rata-rata pengeluaran adalah Rp 51.170,-. Untuk rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan rata-rata pengeluarannya yaitu sebesar Rp.1.470.800 dengan sampel 23 kepala keluarga penyimpangan pengeluaran tersebut Rp.364.3800,- dan standar eror dari rata-rata pengeluaran adalah Rp.75.890,-.

1. Jumlah Sampel kepala keluarga Laki-laki (nL) = 32
2. Jumlah sampel kepala keluarga perempuan (nP) = 23
3. Rata-rata pengeluaran KK rumah tangga Laki-laki (\bar{X}_L) = 1.9195
4. Rata-rata pengeluaran KK rumah tangga perempuan (\bar{X}_P) = 1.4708
5. Simpangan baku pengeluaran rumah tangga laki-laki (SL) = 0.28948²
6. Simpangan baku pengeluaran rumah tangga perempuan(SP) = 0.36438²
7. Derajat kesalahan (α) = 10%

3) Uji Statistik yaitu Beda t

$$T_{hitung} = \frac{\bar{X}_L - \bar{X}_P}{\sqrt{\frac{S_L^2}{n_L} + \frac{S_P^2}{n_P}}}$$

$$T_{hitung} = \frac{1.9195 - 1.4708}{\sqrt{\frac{0.28948^2}{32} + \frac{0.36438^2}{23}}}$$

$$T_{hitung} = 5.807$$

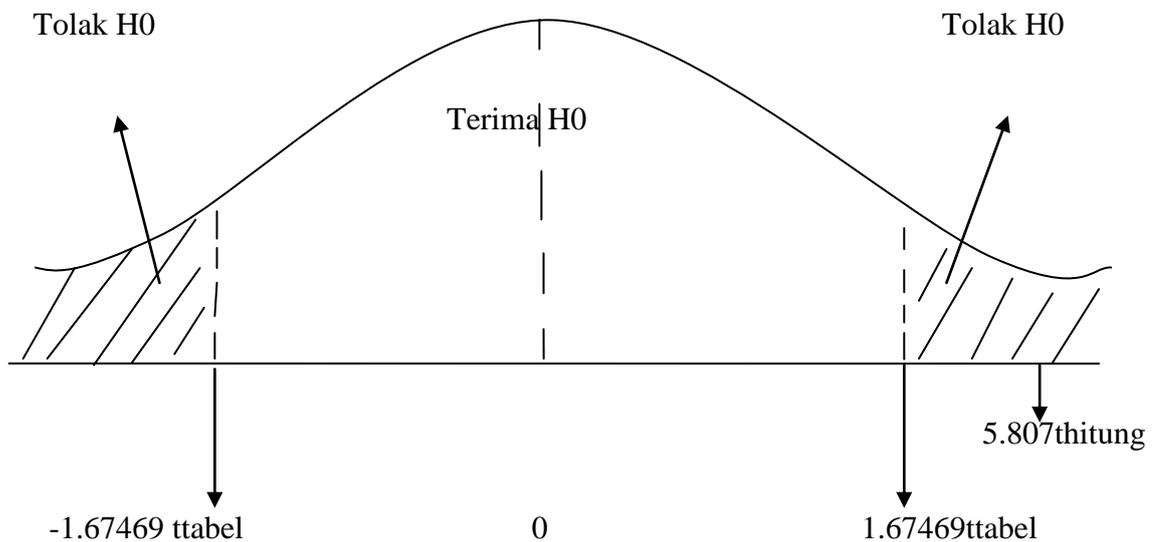
$$T_{tabel} = \pm t_{tabel} (\alpha/2, n_A+n_B-2) = \pm (t_{0.05, 32+23-2}) = 1.67469$$

4) Kriteria Uji

a). Terima H_0 Jika nilai thitung berada dalam internal ttabel atau

$-ttabel \leq thitung \leq ttabel$, hal lain tolak H_0 Karena thitung nilainya = 5.807 sementara ttabel 1.67469 atau $-1.67469 < 5.807 > 1.67469$ berarti tolak H_0 , sehingga bisa simpulkan bahwa ada perbedaan pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan.

b). Dapat dilihat dari kurva distribusi normal t,



Gambar IV.4

Terlihat bahwa nilai thitung berada pada daerah yang diarsir, yaitu tolak H_0 .

c). Atau bisa kita lihat juga hasil output menggunakan alat bantu program komputer yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.5

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differen- ce	Std. Error Differen- ce	90% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pengeluaran	Equal variances assumed	1.542	.220	5.08 7	53	.000	.44875	.08821	.30107	.59643
	Equal variances not assumed			4.89 9	40.5 64	.000	.44875	.09160	.29455	.60295

Dikatakan signifikan yaitu ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk kepala kepala keluarga Laki-laki dengan kepala keluarga perempuan jika nilai sig < $\alpha=10\%$. Karena nilai sig 0,000 < $\alpha= 10\%$ maka ada

perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan.

5) Kesimpulan

Dari hasil Uji beda t maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (Ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Dari Rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kepala keluarga laki-laki dan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun penelitian yang dilakukan terhadap 55 rumah tangga penerima PKH dengan kepala keluarga yang berbeda dan hasil penelitian dari Uji t yang dilakukan peneliti menggunakan program komputer bahwa H_0 ditolak artinya ada perbedaan pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH untuk kepala keluarga laki-laki dan perempuan.
2. Rumah tangga miskin penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) maka pola pengeluaran rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki lebih besar dibandingkan dengan pola pengeluaran rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan di Nagori Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, hal ini dikarenakan rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki cenderung membelanjakan untuk pengeluaran konsumtifnya (Rokok, ngopi diwarung) sedangkan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan lebih memikirkan membelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pembelian konsumtif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta menaikkan taraf kesejahteraan dan memutus mata rantai kemiskinan, namun nyatanya dana yang diberikan oleh pemerintah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja dan tidak bisa menaikkan kesejahteraan hidup dan memutus mata rantai kemiskinan dikarenakan dana yang diterima oleh masyarakat miskin hanya 3 bulan sekali dan jumlah yang diterima oleh masyarakat sendiri tidak sesuai dengan yang di gadang-gadang pemerintah saat ini.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan ketepatan sasaran dalam pemberian dana PKH terhadap masyarakat miskin, karena banyak masyarakat yang hidup berkecukupan juga mendapat dana PKH, dan pemerintah juga harus tetap menjadikan perempuan/ibu-ibu yang harus menerima dana tersebut karena Laaki-laki/bapak-bapak cenderung membelanjakan kebutuhannya sendiri (Rokok dan ngopi diwarung).
3. Pemerintah harus meninjau ulang untuk menetapkan rumah tangga sebagai penerima PKH khususnya di Nagori Pematang Kerasaan Kec.Bandar Kabupaten Simalungun, karena banyak penerima yang hidup berkecukupan mendapatkan PKH. Selain hidup berkecukupan ada juga rumah tangga penrima PKH yang sudah tidak memilliki anak

sekolah namun masih saja mendapat dana untuk anak sekolah, hal ini disebabkan tidak adanya pemutakhiran data untuk calon penerima PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Simalungun 2008 *kabupaten simalungun dalam angka 2008. Kabupaten Simalungun*
- BPS Simalungun 2011 *kabupaten simalungun dalam angka 2011. Kabupaten Simalungun*
- BPS Simalungun 2015 *kabupaten simalungun dalam angka 2015. Kabupaten Simalungun*
- Dumairy ,(1995). *Perekonomian Indonesia, Jakarta : Erlangga*
- Haryati, Nur Dhillia, 2015. *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjung Pinang 2012.*
- <http://blogberita.net/2008/06/05/14-syarat-warga-miskin-penerima-blt/1810208/19.25>
- Kantor Lurah Nagori Pematang Kerasaaan
Kriteria Kemiskinan Warga Miskin Yang Dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Badan Pusat Statistik(BPS) – Bps.go.id
- Kuncoro, mudrajat, (2013).*Metode Riset untuk Bisnis&Ekonomi, Jakarta : Erlangga*
- Marini, Dian, 2015. *Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Simalungun.*
- Mangkoesoebroto, Guritno (1993). *Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.*
- Program Keluarga Harapan (PKH) – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas_files diakses pada hari sabtu, December 3 2016, 09:32:10 AM
- Roswita, Dani,2015. *Statistik Ekonomi ,Jakarta :Mitra Wacana Media*
Selfiana (2016),*Bantuan Langsung Tunai.*
Sukirno , Sadono (2004). *Makro Ekonomi. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada.*
www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas

KUESIONER

POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM

KELUARGA HARAPAN(PKH) DI KELURAHAN/ NAGORI

PEMATANG KERASAAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sauadara/i...

Penerima PKH

Di

Tempat

Assalamualaikum.wr.wb

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian untuk keperluan skripsi yang berjudul “Analisa dampak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Simalungun”, bersama dengan ini saya:

Nama : Lili Rahayu Ningsih

Fakultas/Universitas :EkonomiPembangunan/Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

Memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengisi kuesioner yang disediakan dalam rangka mendukung penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pengeluaran rumah tangga penerima PKH. Jawaban yang obyektif akan sangat membantu penelitian ini. Segala bentuk jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian dan bantuannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum.wr.wb

Hormat Saya,

LILI RAHAY NINGSIH

NPM 1305180021

KUESIONER POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA PENERIMA

PKH

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat : _____

No HP : _____

II. DATA KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

KELUARGA

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Golongan Usia | 2. Kepala Keluarga | 3. Jumlah anggota |
| keluarga | | |
| <input type="radio"/> 20-30 | <input type="radio"/> Laki-laki | <input type="radio"/> 3-4 |
| <input type="radio"/> 31-40 | <input type="radio"/> Perempuan | <input type="radio"/> 5-6 |
| <input type="radio"/> 41-50 | | <input type="radio"/> 7-8 |
| <input type="radio"/> >50 | | |
| 4. Jenis Pekerjaan | 5. Pendidikan Terakhir | 6. Pendapatan |
| keluarga/bulan | | |
| <input type="radio"/> Buruh | <input type="radio"/> Tamat SD | <input type="radio"/> □ 1 juta |
| <input type="radio"/> Karyawan Swasta | <input type="radio"/> Tamat SMP | <input type="radio"/> 1- 2 juta |
| <input type="radio"/> Wiraswasta | <input type="radio"/> Tamat SMA | <input type="radio"/> 2,1- 3 juta |

III . Tabel pola pengeluaran rumah tangga

NO	Jenis-jenis Pengeluaran	Perbulan	
		Fisik	Nilai
1.	Pembelian bahan makanan pokok : <ul style="list-style-type: none"> • Beras • Non beras (Mie, Ubi , Jagung, Terigu)		
2.	Pembelian lauk pauk dan tambahan protein <ul style="list-style-type: none"> • Telur • Ayam • Ikan • Daging • Susu 		
3.	Pembelian bahan penunjang penyediaan makanan <ul style="list-style-type: none"> • Belanja perhari • Bumbu • Minyak goreng • The 		
4.	Pembelian konsumtif (KK Laki-laki) <ul style="list-style-type: none"> • Ngopi (diwarung) • Minyak Kendaraan • Rokok 		

5.	<p>Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listrik • Gas 		
6.	Pembelian air bersih/ untuk air minum		
7.	<p>Pembelian barang-barang untuk sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikat gigi • Pasta Gigi • Sabun mandi • Sabun cuci • Sampo • Pewangi pakaian 		
8.	<p>Pengeluaran perobatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berobat kedokter (pukesmas,klinik) • Warung eceran • Apotik 		
9.	<p>Pengeluaran Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak yang sekolah • Pembayaran uang sekolah • Transprot • Alat tulis • Peelengkapan Sekolah 		
10.	<p>Pembelian untuk sandang /pakaian</p>		

11.	Pengeluaran untuk pesta selamatan (sumbangan)		

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pola Pengeluaran Rumah
Tangga Di Kabupaten Simalungun

No	Pengeluaran	
	Kepala Keluarga Laki-laki	Kepala keluarga Perempuan
1	1.771.500	1.244.500
2	2.216.500	964.500
3	2,050,500	1.628.500
4	1.714.500	1.166.000
5	2.155.500	1.800.000
6	1.651.000	2.284.000
7	1.810.000	1.814.000
8	2.464.500	1.558.500
9	1.491.500	1.261.000
10	1.894.000	1.672.000
11	1.706.500	1.475.000
12	1.585.000	1.578.000
13	2.037.500	1.353.500
14	1.435.500	2.247.000
15	1.333.000	1.177.000
16	2.251.500	1.077.500
17	1.872.900	1.115.000
18	2.107.000	1.995.500

19	1.976.000	1.258.500
20	2.140.000	1.187.000
21	D 2.067.000	1.418.000
22	a 1.919.500	1.447.500
23	t 2.114.500	1.093.000
24	2.250.500	
25	2.052.800	
26	1.421.000	
27	1.769.500	
28	1.945.000	
29	1.984.500	
30	1.877.000	
31	1.865.500	
32	2.114.500	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lili Rahayu Ningsih
NPM : 1305180021
Tempat dan tanggal lahir : Pem. Kerasaan, 25 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Huta I Pematang Kerasaan
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Suyitno
Nama Ibu : Masnah
Alamat : Huta I Pematang Kerasaan

Pendidikan Formal

1. SD Al-wasliyah Tegal Rejo Tamat tahun 2007
2. Madsah Tsanawiyah Al-Jihad Kerasaan Tamat tahun 2010
3. SMA Negeri 2 Bandar Tamat tahun 2013
4. Tahun 2013 - 2017, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2016

LILI RAHAYU NINGSIH